

**RELEVANSI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN *CASH MODIFIED BASIS*:
Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status *Financial distress*
Pemerintah Daerah di Indonesia**

**SUTARYO
BAMBANG SUTOPO
RAHMAWATI
Universitas Negeri Surakarta**

ABSTRACT

This study develops a statistical model (prediction) to explain the factors that can be used as a predictor of financial distress status of local government. Factors are suspected as a predictor of financial distress is the status of financial ratios in the Local Government Financial Statetement (LKPD) based on the modified cash basis. This study uses a population of all local governments in Indonesia and local governments are divided into two; 319 as the analysis sample and 50 as a holdout sample. This study uses the data of local government financial statetements in 2005-2010 that obtained in the form of softcopy and hardcopy of the Republic Indonesia Supreme Audit Board (BPK-RI) and other media publications. For testing data, this study uses Discriminant Analysis test (DA) with the model testing two years after years of local government financial statement.

Test results show that financial ratios on the financial statements of local governments in Indonesia can be used to predict the status of financial distress, so it can be concluded that the local government financial statement information has a value relevant for economic decision-making to its users. These results demonstrated the feasibility of the developed predictive models and predictive capability in the analysis of samples of 73.7% and accuracy of prediction in the holdout sample was 68%.

Key words: the status of financial distress, financial ratios, relevant value, local government loans, local government financial statetement information.

A. PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 1 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan (Paragraf 9) menyatakan bahwa tujuan umum pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara khusus, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang

dipercayakan pada entitas bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 tentang SAP, bahwa akuntansi pemerintah menggunakan *cash modified basis* dan kemudian diperbaharui dengan PP No. 71 tahun 2010 yang menggunakan *accrual basis*.

Untuk tujuan tersebut, maka informasi dalam laporan keuangan harus mempunyai karakteristik kualitatif, yang salah satunya adalah relevan. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dinyatakan memiliki nilai relevan jika informasi tersebut memenuhi empat kriteria, yang terdiri dari nilai umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu (*timelines*) dan lengkap (*completeness*).

Beberapa penelitian telah menguji nilai prediksi sebagai bentuk manifestasi dari nilai relevan atas atribut laporan keuangan pemerintah. Peneliti yang dimaksud menghubungkan atribut laporan keuangan pemerintah dengan prediksi kegagalan keuangan pemerintah (Ingram et al., 1987; Reck et al., 2004; Plummer et al., 2007; dan Jones dan Walker, 2007). Secara empiris, penelitian berhasil membuktikan bahwa atribut laporan keuangan pemerintah dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan pemerintah yang diukur dengan *bond rating* dan *yield* atas obligasi pemerintah (Ingram et al., 1987; Plummer et al., 2007) dan *interest cost* (Reck et al., 2004) serta *service delivery* (Jones dan Walker, 2007). Sutaryo et al. (2010) membuktikan bahwa atribut laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia mempunyai nilai relevan dalam memprediksi kegagalan keuangan pemerintah daerah (*financial distress*), walaupun dalam tingkatan yang lemah.

Penelitian terkait nilai relevan laporan keuangan pemerintah lebih berkembang di luar negeri yang terlebih dahulu mengembangkan akuntansi pemerintah. Sementara itu, di Indonesia, teori dan bukti empiris tentang nilai relevan informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih relatif terbatas. Oleh karena keterbatasan tersebut, maka terjadi *research gap* terkait dan nilai relevan laporan keuangan pemerintah dan dengan demikian nilai relevan laporan keuangan menjadi penting untuk diteliti.

Penelitian ini menginvestigasi nilai relevan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disusun dengan *cash modified basis* terkait dengan status *financial distress* pemerintah daerah. *Financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah dalam mengembalikan baik pokok maupun bunga pinjaman pemerintah daerah. Ketidakmampuan pemerintah ini didasarkan pada PP No. 54/2005 tentang pinjaman daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik teoritis maupun empiris berupa pengembangan model prediksi terkait dengan nilai relevan laporan keuangan pemerintah daerah dan *financial distress*. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat mengurangi *research gap* yang ada.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

1. Laporan keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 21).

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Entitas pelaporan diperkenankan untuk

menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

2. Nilai Relevan Sebagai Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Relevansi merupakan karakteristik kualitatif dari laporan keuangan yang berguna untuk membantu penggunaannya dalam memprediksi estimasi pembayaran yang akan datang (*future payoff estimate*) (Scott, 2003). Kerangka konseptual akuntansi pemerintah menyatakan bahwa relevansi adalah informasi akuntansi keuangan yang relevan dan mempunyai pengaruh terhadap keputusan ekonomis yang menggunakan informasi akuntansi keuangan ini. Sebaliknya, Kieso dan Weygandt (2005) mengatakan bahwa relevansi dapat dihubungkan dengan tujuan penggunaannya, yaitu untuk pengambilan keputusan. Berkaitan dengan tujuan relevansi maka dapat dipilih metoda-metoda pengukuran dan pelaporan akuntansi keuangan sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengambil jenis keputusan yang memerlukan data akuntansi. Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa relevansi berkaitan dengan pengukuran laporan keuangan yang digunakan oleh para pengguna (*users*) dalam pengambilan keputusan.

3. *Financial distress* Pemerintah

Menurut Jones dan Walker (2007), *financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik tersebut. Kondisi kekurangan atau ketidaktersediaan dana ini mengindikasikan bahwa pemerintah mengalami kesulitan keuangan.

Clark (1977) membahas empat indikator keterbatasan keuangan/ fiskal pemerintah yang meliputi; 1) probabilitas *default*, yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah membayar obligasinya; 2) indikator rasio, seperti utang bruto dibagi dengan pajak berdasarkan utang jangka pendek, 3) indikator berbasis sosial dan ekonomi, seperti ukuran populasi dan rata-rata pendapatan per kapita, dan 4) indikator aliran kas. Indikator lain yang berpotensi dapat menunjukkan *stress* pemerintah daerah adalah *merger*. Perusahaan swasta yang mengalami kesulitan keuangan dapat mencari mitra *merger* dan biasanya menyatu dengan mitra bisnis yang dalam posisi keuangan yang kuat. Namun, *merger* pemerintah daerah dibatasi oleh pertimbangan geografis. Biasanya, pemerintah daerah yang mengalami kesulitan keuangan bergabung dengan pemerintah daerah yang berdekatan dan hanya sedikit akan mengalami perbaikan keuangannya (Jones dan Walker, 2007).

Financial distress pemerintah daerah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan baik pokok maupun bunga pinjaman. Kemampuan yang dimaksud dapat diindikasikan dengan *debt service coverage ratio* (DSCR) sebagaimana diatur dalam PP No. 54/2005 tentang pinjaman daerah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah jika mempunyai tingkat DSCR minimal 2,5 (dua setengah). Bagi pemerintah daerah yang tidak mampu mencapai tingkat DSCR tersebut, tidak diperbolehkan untuk melakukan pinjaman daerah karena dkuatirkan akan mengembalikan baik pokok maupun bunga pinjaman. Apabila pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman (mempunyai DSCR kurang dari 2,5) dapat dinyatakan dalam status *financial distress*.

4. Pengembangan Hipotesis

Kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi kegagalan keuangan pemerintah telah diuji oleh beberapa penelitian sebelumnya. Rasio keuangan atas laporan keuangan yang sering digunakan di antaranya adalah *profitability ratio*, *liquidity ratio*, *capital structure ratio*, dan *performance ratio* (Steven dan McGowen, 1983; Groves et al., 2001; Cohen, 2006; Plummer et al., 2007; dan Jones dan Walker, 2007) Sutaryo et al. (2010). *Profitability ratio* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan entitas dalam menyediakan pengembalian keuangan dengan sumberdaya yang digunakan. Rasio profitabilitas merupakan proporsi laba dengan sumberdaya (aset dan atau ekuitas) yang digunakan entitas. Rasio profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa entitas mempunyai kemampuan yang baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian keuangan dan oleh karenanya entitas akan mempunyai dana yang cukup untuk mendanai operasional, investasi dan pemenuhan kewajiban pembayaran utang dan bunga.

Dalam organisasi pemerintah yang *non profit oriented*, rasio profitabilitas disesuaikan (*adjust*) melalui penggantian laba (rugi) dengan surplus (defisit) atas anggaran pemerintah. Surplus (defisit) yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah kurang baik dalam pelaksanaan anggarannya. Surplus yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mampu melaksanakan program kerja yang telah direncanakan sehingga anggaran yang telah ditetapkan tidak terserap secara baik. Sebaliknya, defisit anggaran mengindikasikan bahwa pendapatan pemerintah daerah tidak mampu menutup jumlah pengeluaran atau belanja daerah. Oleh karena itu, surplus (defisit) dapat mengindikasikan kinerja anggaran pemerintah daerah yang tidak baik. Dengan demikian tentunya dapat berpengaruh terhadap ketersediaan dana pemerintah hingga dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam pembayaran pokok maupun bunga pinjaman.

Beberapa penelitian telah membuktikan nilai relevan rasio profitabilitas. Ryan et al. (2000) menggunakan *revenue flexibility/ intensity* dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan

pemerintah daerah terkait pelaporan keuangan. Sementara itu, Cohen (2006) berhasil membuktikan bahwa rasio profitabilitas berupa *return on equity* (ROE), *return on asset* (ROA), dan *profit margin* mampu menjelaskan (*explanatory*) kinerja keuangan pemerintah daerah di Yunani. Begitu juga Jones dan Walker (2007) yang menggunakan ROA sebagai *explanatory local government distress* di Australia. Sutaryo et al. (2010) menggunakan rasio surplus/ defisit PM, ROE, dan ROA terkait dengan *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia dengan model pengujian *logistic regression*. Penelitian ini menggunakan *return on equity*, *return on asset* dan *profit margin* sebagai proksi rasio profitabilitas sebagaimana digunakan dalam penelitian Cohen (2006) dan Jones dan Walker (2007) dan Sutaryo et al., (2010).

Financial distress sering dikaitkan dengan utang. Utang pemerintah merupakan bagian penting dalam pendanaan pemerintah. Utang pemerintah dapat digunakan sebagai penopang dalam pembiayaan pembangunan di daerah jika pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat tidak mencukupi kebutuhan dana pemerintah daerah (Halim dan Damayanti, 2008). Menurut PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman baik pada pemerintah pusat maupun pihak ketiga. Jika utang dilakukan pada pemerintah pusat, maka bunga dan syarat pengembalian utang dilakukan dengan fleksibel dalam arti bunga pinjaman rendah dan dalam hal pengembalian dapat dinegosiasikan. Berbeda dengan pinjaman pada pemerintah pusat, jika pinjaman dilakukan pada pihak ketiga (perbankan), maka perlakuan utang pemerintah sama halnya dengan pinjaman pada sektor swasta.

Salah satu indikator *financial distress* adalah jumlah utang yang tinggi (Almilia, 2006). Rasio yang mengukur kemampuan entitas dalam mengembalikan utang lancar adalah rasio likuiditas yang dapat dinyatakan dengan *current ratio*. Entitas dengan likuiditas yang tinggi mengindikasikan bahwa entitas bersangkutan mempunyai jumlah aktiva lancar yang

cukup untuk memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo tanpa mengganggu jalannya operasional secara signifikan. Sebaliknya, likuiditas yang rendah mengindikasikan bahwa entitas mempunyai jumlah aktiva lancar yang tidak mencukupi untuk menjamin pembayaran kewajiban lancar ketika jatuh tempo sehingga dapat berpengaruh pada *financial distress*. Platt dan Platt (2002) dan Almilia dan Kristijadi (2003) membuktikan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan.

Selain likuiditas, utang juga dapat digunakan sebagai penentuan rasio struktur modal (*capital structure ratio*). Rasio ini merupakan proporsi antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas atau aset entitas. Rasio yang tinggi memberi gambaran bahwa entitas mempunyai kewajiban untuk memenuhi utang jangka panjang dalam jumlah yang tinggi dengan menggunakan ekuitas atau aktiva tetap yang dimiliki. Dengan demikian, jumlah utang jangka panjang yang tinggi dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan entitas dalam jangka panjang sehingga dapat berpengaruh terhadap *financial distress* (Almilia, 2006).

Beberapa penelitian pada sektor pemerintahan yang menggunakan proporsi utang dilakukan Ryan et al. (2000) dengan hasil bahwa *indebtednes* memberi penggambaran kesehatan keuangan pemerintah daerah dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sementara itu, Groves et al. (2001) menggunakan rasio terkait kewajiban berupa *debt structure* dan *unfunded liabilities* untuk memberi penggambaran kewajiban pemerintah terkait kemampuan pembayaran kewajiban pemerintah dalam penelitian yang dilakukannya. Bukti empiris yang diperoleh adalah pemerintah dengan kewajiban yang tinggi berkecenderungan untuk mempunyai kinerja yang lebih baik dibanding pemerintah yang mempunyai jumlah utang yang rendah. Cohen (2006) menggunakan rasio terkait kewajiban keuangan pemerintah berupa *debt to equity ratio* dan *long term liabilities to total assets* dalam memprediksi kinerja pemerintah daerah di Yunani. Hasil penelitian ini adalah bahwa rasio utang pemerintah berpengaruh pada kinerja pemerintah walaupun dalam pengaruh yang

rendah. Steven dan McGowen (1983) menggunakan *total debt to total revenue ratio* untuk menggambarkan solvabilitas pemerintah yang dihubungkan dengan kinerja keuangan pemerintah. Selain itu, Groves et al. (2001) menggunakan *long term to total asset ratio* yang diasosiasikan dengan kinerja pemerintah daerah. Jones dan Walker (2007) dan Sutaryo et al., (2010) menggunakan *total debt to total asset* sebagai *explanatory variable* dalam pengujian *distress* pemerintah.

Selain itu, rasio kinerja (*performance ratio*) juga berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah. Kinerja pemerintah dapat diukur dengan efisiensi yang merupakan pencapaian *output* yang maksimal dengan *input* tertentu, atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Jadi, efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara *output* dengan *input* (biaya) (Halim dan Damayanti, 2008). Berbagai penelitian telah menggunakan rasio efisiensi, di antaranya: Cohen (2006) dan Sutaryo et al., (2010) menggunakan dua rasio yang menggambarkan efisiensi yang terjadi dalam pemerintah, kedua rasio yang dimaksud adalah *operating revenues to operating expenditure* (OROE) dan *operating revenue to total revenue* (ORTR). OROE merupakan perbandingan antara jumlah total pengeluaran operasional dengan jumlah total pendapatan operasional Pemerintah. Rasio OROE yang rendah mengindikasikan bahwa pemerintah mempunyai pengeluaran yang tinggi dan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dalam kondisi yang tidak efisien serta mempunyai probabilitas yang tinggi untuk berada dalam status *financial distress*. ORTR merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan operasional terhadap jumlah total pendapatan daerah. Rasio ORTR yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu menciptakan pendapatan operasional (PAD) yang tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap total pendapatan daerah. Kondisi ini dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah berada dalam kondisi yang efisien dan dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan rerangka pengujian data status *financial distress* dua tahun setelah pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun tiap akhir tahun tertentu dan harus disampaikan ke pemerintah pusat selambat-lambatnya 6 bulan dari tanggal pelaporan. Setelah itu, laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah daerah dipublikasi, diakses dan dianalisis oleh pemakai laporan keuangan pada tahun kedua setelah pelaporannya. Selain itu, pengaruh dari hasil realisasi anggaran (surplus/ defisit) terjadi pada dua tahun setelah pelaporan dilakukan. Pemerintah daerah yang mempunyai saldo selisih anggaran (SILPA) surplus hanya dapat mengajukan anggaran pada tahun berikutnya maksimal sebesar jumlah realisasi tahun sebelumnya dan surplus tersebut akan ditambahkan ke dalam saldo kas daerah yang hanya digunakan jika pemerintah daerah mengalami kekurangan (defisit) pada tahun berikutnya. Adanya ketentuan ini berpengaruh pada ketersediaan dana bagi pemerintah daerah sehingga dapat berpengaruh terhadap status *financial distress* pemerintah daerah dua tahun setelah pelaporan keuangan daerah.

Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_a: Rasio keuangan atas laporan keuangan pemerintah mempunyai kemampuan dalam memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah.

C. METODA PENELITIAN

1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan dan dipublikasi melalui *website* www.bpk.go.id.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria pengambilan sampel adalah pemerintah daerah kabupaten/ kotamadya seluruh Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan pemerintah pada tahun 2005-2010, pemerintah daerah melaporkan utang jangka panjang, serta menyajikan data lain untuk pengukuran variabel penelitian. Sampel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu *analysis sample* dan *holdout sampel*. Setelah dilakukan identifikasi terdapat 2988 LKPD, tetapi penelitian ini menggunakan rentang pengujian dua tahun dan harus memenuhi kriteria sampel, sehingga terdapat 369 pemerintah daerah terpilih sebagai sampel penelitian. Atas jumlah itu, 319 pemerintah dijadikan *analysis sample* dan 50 pemerintah daerah dijadikan *holdout sample*.

2. Data Dan Sumber Data

Sumber data dari strategi ini adalah data sekunder (*secondary data*) yaitu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik pengumpulan data dari basis data (Hair et al., 2009). Data sekunder tersebut terdiri dari; laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2005-2009, dan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan penyusunan, penyajian dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dikumpulkan dari catatan atau basis data baik berupa *hardcopy* maupun *softcopy* yang diperoleh dari hasil *download* pada *website* dan dokumentasi arsip-arsip Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu www.bpk.go.id dan sumber data lain yang terkait.

3. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan adalah status *financial distress* pemerintah daerah. Clark (1977) membahas indikator keterbatasan keuangan/ fiskal pemerintah yang salah satunya adalah probabilitas *default*, yaitu ketidakmampuan pemerintah daerah membayar kewajiban. Penelitian ini menggunakan definisi *financial distress* pemerintah daerah sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam pembayaran baik pokok maupun bunga pinjaman yang diukur dengan *debt service coverage ratio* sesuai dengan PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah.

Status adalah pengelompokan sampel penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan status yang dibedakan ke dalam dua kelompok sampel, yaitu pemerintah daerah dengan status *distress* dan pemerintah daerah *non distress*. Pengelompokan sampel penelitian ini menggunakan nilai *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 54/2005 Tentang Pinjaman Daerah. DSCR adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan Sumber Daya Alam, dan Bagian Daerah Lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan, serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib terhadap penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut ini.

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) - \text{BELANJA WAJIB}}{\text{ANGSURAN POKOK PINJAMAN} + \text{BUNGA} + \text{BIAYA LAIN}}$$

Notasi:

DSCR	=	<i>Debt Service Coverage Ratio</i> atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman;
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah;
DAU	=	Dana Alokasi Umum;
DBH	=	Dana Bagi Hasil; dan

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi.

Ketentuan kelayakan pemberian pinjaman jangka panjang adalah *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah). Untuk pemerintah daerah yang mempunyai nilai DSCR < 2.5, maka dinyatakan sebagai pemerintah daerah dengan status *financial distress* dan dilambangkan dengan angka 2, sementara untuk pemerintah daerah yang mempunyai nilai DSCR > 2.5 dinyatakan sebagai pemerintah daerah *non financial distress* dan dilambangkan dengan angka 1.

b. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah rasio dalam laporan keuangan daerah yaitu berupa laporan realisasi anggaran dan neraca. Rasio-rasio yang digunakan adalah rasio sebagaimana digunakan Cohen (2006), Jones dan Walker (2007), dan Plummer et al. (2007) serta Sutaryo et al., (2010) yang merupakan *adjusted ratio* atas laporan keuangan entitas swasta. Rasio keuangan yang digunakan dikelompokkan menjadi; *profitability ratio* (surplustabilitas), *liquidity ratio*, *capital structure ratio*, dan *performance ratio*. Adapun rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

INSERT TABEL 1^(a, b)

c. Metoda Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis diskriminan yang dikembangkan oleh Almant (1968). Penelitian ini menggunakan rentang waktu pengujian dua tahun setelah pelaporan LKPD. Pemilihan rentang waktu pengujian ini didasarkan pada mekanisme keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Adapun model yang diskriminan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini.

$$Z_{t-2} = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \dots + \beta_n X_{nt}$$

Notasi:

Z_{t-2} = skor,

- α = konstanta,
 β = koefisien diskriminan,
 X_t = rasio keuangan pemerintah daerah, dan
 N = jumlah variabel/angka rasio keuangan yang digunakan.

D. ANALISIS DATA

1. Deskripsi data

Deskripsi statistik data penelitian memberik gambaran secara umum atas data yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi yang dimaksud meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Selengkapnya deskripsi data dalam penelitian ini dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

INSERT TABEL 2

2. Analisis Diskriminan

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *discriminant analysis* (DA). Analisis Diskriminan adalah teknik *multiple multivariate* menggunakan beberapa variabel secara bersamaan untuk mengklasifikasikan pengamatan ke dalam salah satu dari beberapa kelompok (Hair et al., 2009), dalam penelitian ini kelompok adalah pemerintah daerah status *financial distress* dan *non financial distress*. Sebelum dilakukan analisis diskriminan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik baik normalitas maupun multikolinieritas, dan diperoleh bahwa data penelitian yang digunakan terbebas dari gejala asumsi klasik baik normalitas, maupun multikolinieritas.

Setelah terbebas dari asumsi klasik, maka dilakukan uji analisis diskriminan. Hasil yang diperoleh atas uji menunjukkan bahwa beda rata-rata rasio keuangan di antara kelompok sampel dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

INSERT TABEL 3

Tabel di atas mengindikasikan bahwa rasio PM, ROA, ORTA, ORCA, ORWCA, LTTA, DTA, dan TETA mempunyai nilai rata-rata yang berbeda secara signifikan di antara

kelompok pemerintah daerah dengan status *financial distress* dan status *non financial distress*. Sementara itu, untuk rasio ROE, CR, WCR, ORTR, OROE, dan DER tidak berbeda secara signifikan di antara kedua kelompok sampel. Oleh karena itu, rasio-rasio tersebut dapat digunakan dalam pembentukan model diskriminan.

Selain itu, hasil analisis diskriminan juga mengindikasikan bahwa Kelayakan (*fit*) model diskriminasi diuji berdasarkan nilai wilks' lamda. Nilai wilks' lamda adalah 0,917 dengan nilai *chi-square* adalah sebesar 26,934 serta nilai signifikansi 0,003. Nilai signifikansi penelitian ini lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian ($0,003 < 0,05$) sehingga model diskriminan yang digunakan dalam penelitian ini layak (*fit*) untuk digunakan. Selengkapanya nilai wilks' lamda dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

INSERT TABEL 4

Hasil analisis diskriminan juga menunjukkan bahwa kemampuan model dalam prediksi status *financial distress* pemerintah di Indonesia adalah sebesar 73,7%. Hasil ini dapat diindikasikan dari jumlah 319 pemerintah daerah yang menjadi *analysis sample*, 56 sampel terjadi kesalahan prediksi dan 263 sampel diprediksi secara tepat oleh model yang digunakan dalam penelitian ini. Selengkapanya hasil yang menunjukkan kemampuan model dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

INSERT TABEL 5

Untuk pengujian lebih lanjut terhadap kemampuan prediksi model yang digunakan, maka dilakukan pengujian terhadap 50 pemerintah daerah yang menjadi *holdout sample*. Pengujian ini dilakukan dengan model analisis diskriminan yang diperoleh dalam analisis sebelumnya yang dapat dituliskan seperti berikut ini.

$$Z_{t-2} = 0,966 - 0,98 (PM) + 6,158 (ROE) - 10,541 (ROA) - 0,00061 (CR) - 2,264 (ORTR) - 0,370 (OROE) + 3,425 (ORTA) + 0,296 (ORCA) - 0,007 (ORWCA) + 0,966 (DER)$$

Model tersebut digunakan untuk menentukan skor dari masing-masing pemerintah daerah yang menjadi *holdout sample*. Selain itu, berdasarkan hasil analisis diskriminan diperoleh nilai *centroids* yaitu $-0,166$ untuk kelompok pemerintah daerah dengan status *non financial distress* dan $0,540$ untuk kelompok pemerintah daerah dengan status *financial distress*. Nilai *centroids* ini diperlukan untuk menentukan titik potong (*cutting score*) antara kelompok pemerintah daerah dengan status *non financial distress* dan status *financial distress*. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel kelompok yang berbeda. Untuk kelompok sampel pemerintah daerah dengan status *financial distress* berjumlah 75 pemerintah daerah, dan untuk pemerintah daerah dengan status *non financial distress* adalah 244. Untuk penentuan *cutting score* dengan jumlah kelompok sampel yang tidak sama dapat digunakan rumus seperti berikut ini (Ghozali, 2009).

$$\text{Cut score} = \frac{n_1 Z_1 + n_2 Z_2}{n_1 + n_2}$$

Notasi:

N_1 = jumlah sampel kelompok pemerintah daerah dengan status *non financial distress*

N_2 = jumlah sampel kelompok pemerintah daerah dengan status *financial distress*

Z_1 = nilai *centroids* kelompok pemerintah daerah dengan status *non financial distress*

Z_2 = nilai *centroids* kelompok pemerintah daerah dengan status *financial distress*

Dengan rumus di atas, maka dapat ditentukan *cutting score* seperti berikut ini.

$$\begin{aligned} \text{Cut score} &= \frac{244(-0,166) + 75(0,540)}{244 + 75} \\ &= -0,000125 \end{aligned}$$

Berdasar pada hasil nilai *cutting score* tersebut, maka dapat ditentukan bahwa nilai $Z_{t-2} \geq -0,000125$ masuk dalam kelompok pemerintah daerah dengan status *non financial distress*, $Z_{t-2} \leq -0,000125$ masuk dalam kelompok pemerintah daerah dengan status *financial distress*. Hasil perhitungan Z_{t-2} prediksi status pemerintah daerah dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

INSERT TABEL 6

Tabel di atas mengindikasikan bahwa kemampuan model dalam memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia adalah 68%. Hasil ini dibuktikan dengan jumlah kesalahan prediksi sebanyak 16 pemerintah daerah dari 50 pemerintah daerah yang menjadi *holdout sample*.

E. PEMBAHASAN

Penelitian bertujuan untuk *explanatory* rasio keuangan atas LKPD dalam penentuan status *financial distress* pemerintah daerah. Status *financial distress* adalah tahapan kondisi ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pokok dan bunga pinjaman daerah. Informasi bahwa suatu pemerintah daerah berada dalam status *financial distress* sangat bermanfaat, terutama untuk memberikan tanda peringatan awal adanya kegagalan keuangan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, manajemen daerah dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kegagalan. Selain itu, *stakeholders* pemerintah daerah yang lain, seperti investor, kreditor, dan lembaga donor juga memerlukan informasi mengenai status *financial distress* suatu pemerintah daerah sehingga mereka dapat mengambil keputusan ekonomi dan bisnis yang tepat menghadapi kemungkinan kesulitan (kegagalan) keuangan pemerintah daerah di masa depan.

Isu menarik dalam melakukan prediksi ini adalah bahwa nilai prediksi merupakan salah satu unsur relevansi nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang sedang dikembangkan dan diperbaiki oleh pemerintah sampai dengan saat ini. Melalui penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diharapkan informasi dalam LKPD dapat mempunyai nilai relevan (nilai prediksi) sehingga tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat tercapai.

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa rasio keuangan dalam LKPD dapat digunakan untuk memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah. Dari 14 rasio yang digunakan dalam penelitian ini, 10 rasio terbukti dapat digunakan dalam memprediksi status *financial distress*, yaitu; PM, ROE, dan ROA (rasio surplus/defisit), CR, OROE, ORTR, ORCA, ORTA, ORWCA, DER. Jika *stakeholders* pemerintah daerah akan melakukan prediksi status *financial distress* perusahaan, maka dapat menggunakan rasio keuangan dalam LKPD. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kelayakan model dan keberhasilan model dalam memprediksi status *financial distress* pada *analysis sample* yaitu 73,7% (lihat tabel 3), dan pada *holdout sample* yaitu sebesar 68% sebagaimana tersaji dalam tabel 5. Tingkat keberhasilan di atas 50% ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan merupakan model prediksi yang cukup kuat.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini didukung. Hasil penelitian ini mendukung bukti empiris penelitian sebelumnya bahwa informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat digunakan dalam memprediksi suatu kejadian masa depan sehingga relevan dalam pengambilan keputusan, seperti kegagalan (*default risk*) keuangan pemerintah (Plummer et al., 2007), *distress* pemerintah daerah (Jones dan Walker, 2007), dan *financial distress* pemerintah daerah (Sutaryo, et al., 2010).

F. PENUTUP

1. Simpulan

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan rasio keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun dengan dasar *cash modified* dalam memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang diajukan bahwa rasio keuangan atas laporan keuangan mempunyai kemampuan untuk memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah, sehingga dapat dinyatakan bahwa informasi dalam LKPD mempunyai nilai relevan untuk pengambilan

keputusan bagi pemakainya sebagai tujuan pelaporan keuangan yang tercantum dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah.

Penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa model prediksi yang dikembangkan dalam penelitian mempunyai kelayakan (*fit*) untuk digunakan dan mempunyai keberhasilan prediksi yang cukup kuat baik pada pengujian *analysis sample* maupun *holdout sample*. Dengan demikian pemakai laporan keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan ekonomis, terutama informasi awal terkait status *financial distress* pemerintah daerah.

2. Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai keterbatasan. Penelitian ini hanya mengidentifikasi faktor-faktor keuangan berkemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, penelitian ini tidak mengeluarkan LKPD dengan opini yang kualitas informasinya kurang baik, seperti LKPD dengan opini *adverse* dan *disclamer* dari sampel penelitian, dan penelitian ini tidak membedakan sampel berdasarkan kriteria tertentu, seperti letak geografis pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

3. Saran

Untuk dapat mengembangkan hasil penelitian lebih lanjut, maka penelitian berikutnya dapat menggunakan faktor-faktor *non* keuangan seperti yang digunakan oleh Jones dan Walker (2007), hanya menggunakan LKPD dengan opini yang menjamin kualitas informasi dalam LKPD dengan mengeluarkan LKPD yang beropini *adverse* dan *disclamer*, dan membedakan sampel berdasarkan letak geografis pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, Spica Luciana. 2006. *Prediksi Kondisi Financial distress Perusahaan Go Public Dengan Metode Multinomial Logit*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEB). 7(1): 1-26.
- _____ dan Kristijadi. 2003. *Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial distress Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI).7(2): 63-77.
- Altman, Edward I, 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and The Prediction of Corporate Bankruptcy. *Journal of Finance*, 23(4): 137-152.
- Clark, T. N., 1977. Fiscal Management of American Cities: Funds Flow Indicators, *Journal of Accounting Research*, Vol. 15 (Supplement).
- Cohen, Sandra. 2006. Identifying the Moderator Factor of Financial Performance in Greek Municipal. *Annual Conference*. 5th. HFAA. Thessaonica.
- Groves. S. Godsey, dan Shulman. 2001. Financial Indicator for Local Government. *Public Finance International City Management Association*. 9: 243-255.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul, dan Damayanti. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai*. BPFE. Yogyakarta.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C. 2009. *Multivariate Data Analysis*, NJ: Prentice-Hall.
- Ingram, R. W., K. K. Raman dan E. R., Wilson. 1987. Governmental Capital Market Research in Accounting: A Review. *Research in Governmental and Non Profit Accounting*. 3: 98-97.
- Jones, Stewart dan R., G., Walker. 2007. Explanators of Local Government Distress. *ABACUS*. 43(3): 396-418.
- Kieso, D. E. dan Weygandt, J., J. 2005. *Akuntansi Intermediate*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2005. *Tentang Pinjaman Daerah*.
- _____, Nomor: 24. 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- _____, Nomor: 71. 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.

- Plummer, E., Hutchison, P., dan Patton, T. 2007. GSAB No. 34's Government Financial Reporting Model: Evident on Its Information Relevan. *The Accounting Review*. 82(1): 205-240.
- Platt, H., dan M. B. Platt. 2002. Predicting *Financial distress*. *Journal of Financial Service Professionals*. 56: 12-15.
- Reck, J. L., E., R, Wilson, D. Gotlob, dan M. Lawrence. 2004. Government Capital Markets Research in Accounting: A Review. Extension and Directions Future. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting*. 11: 1-33.
- Ryan, Christine, Dunstan, Keitha, dan Robinson, Marc dan Grigg, Trevor. 2000. Financial Performance Indicators for Australian Local Governments. *Accounting, Accountability and Performance* 6(2): 89-106.
- Scott, W., R. 2003. *Financial Accounting Theory*. Toronto Canada: Prentice-Hall.
- Steven, J., dan McGowen, R. 1983. Financial Indicators and Trends for Local Government: A State-Based Policy Perspective. *Policy Study Rivew*. 2(3): 33-51.
- Sutaryo, Bambang, S., dan Doddy, S. 2010. Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait *Financial Distress* Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto, 13-14 Oktober.

LAMPIRAN

TABEL 1^a
Variabel Penelitian

VARIABEL	DESKRIPSI	VARIABEL	DESKRIPSI
X ₁	<i>Profit Margin Ratio</i>	X ₈	<i>Operating Revenue to Total Asset Ratio</i>
X ₂	<i>Return on Equity</i>	X ₉	<i>Operating Revenue to Current Asset Ratio</i>
X ₃	<i>Return on Asset</i>	X ₁₀	<i>Operating Revenue to Working Capital Ratio</i>
X ₄	<i>Current ratio</i>	X ₁₁	<i>Long Term Liabilities to Total Asset Ratio</i>
X ₅	<i>Working Capital Ratio</i>	X ₁₂	<i>Debt to Equity Ratio</i>
X ₆	<i>Operating Revenue to Total Revenue Ratio</i>	X ₁₃	<i>Debt to Total Asset Ratio</i>
X ₇	<i>Operating Revenue to Operating Expenses Ratio</i>	X ₁₄	<i>Total Equity to Total Asset</i>

TABEL 1^b
Klasifikasi Rasio Keuangan

VARIABEL	TIPE RASIO
X ₁ , X ₂ , X ₃	<i>Profitability Ratio (Surplustabilitas)</i>
X ₄ , X ₅	<i>Liquidity Ratio</i>
X ₆ , X ₇ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀	<i>Performance Ratio</i>
X ₁₁ , X ₁₂ , X ₁₃ , X ₁₄	<i>Capital Structure Ratio</i>

TABEL 2
Statistik Deskriptif

VARIABLE	N	MINIMUM	MAXIMUM	MEAN	STD. DEVIATION
PM	369	-12.0782	15.0509	.535890	1.8326881
ROE	369	-2.1031	.5503	.015878	.1213977
ROA	369	-.1528	12.2923	.054797	.6406864
CR	369	.0926	4.7281E3	1.437396E2	398.4832133
WCR	369	-.9074	4.7271E3	1.428209E2	398.4644357
ORTR	369	.0367	1.0000	.547775	.1259572
OROE	369	.0076	18.8883	.230940	1.3006069
ORTA	369	.0005	38.6557	.151030	2.0109781
ORCA	369	.0204	11.4012	.971464	1.3980059
ORWCA	369	-17.6454	35.3491	-1.886606E0	48.4728465
LTTA	369	.0000	153.5587	.422075	7.9937437
DER	369	.0000	1.7573	.019793	.1057183
DTA	369	.0000	264.6623	.731213	13.7771321
TETA	369	.0068	735.3377	3.019215E0	38.2297332
STATUS	369	1.0000	2.0000	1.243902E0	.4300176
Valid N (listwise)	369				

Sumber: data sekunder yang diolah

TABEL 3
Hasil Uji Beda Rata-Rata Kelompok Sampel

variable	Wilks' Lambda	F	df1	df2	Sig.
PM	.987	4.307	1	317	.039*
ROE	1.000	.072	1	317	.788
ROA	.991	2.776	1	317	.097**
CR	.993	2.097	1	317	.149
WCR	.993	2.105	1	317	.148
ORTR	.998	.580	1	317	.447
OROE	.997	1.023	1	317	.313
ORTA	.990	3.123	1	317	.078**
ORCA	.990	3.268	1	317	.072**
ORWCA	.986	4.409	1	317	.037*
LTTA	.990	3.329	1	317	.069**
DER	.993	2.339	1	317	.127
DTA	.990	3.321	1	317	.069**
TETA	.990	3.231	1	317	.073**

*signifikan pada $\alpha = 5\%$, ** signifikan $\alpha = 10\%$

Sumber: data sekunder yang diolah

TABEL 4
Hasil Uji Kelayakan Model

Test of Function(s)	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1	.917	26.934	10	.003

Sumber: data sekunder yang diolah

TABEL 5
Hasil Uji Kemampuan Prediksi

		Predicted Group Membership			
		STATUS	1	2	Total
Original	Count	1	195	49	244
		2	35	40	75
	%	1	79.9	20.1	100.0
		2	46.7	53.3	100.0

a. 73.7% of original grouped cases correctly classified.

Sumber: data sekunder yang diolah

TABEL 6
Hasil Uji Ketepatan Prediksi *Holdout Sample*

SAMPEL	Z _{t-2} SCORE	PREDIKSI	EVALUASI	SAMPEL	Z _{t-2} SCORE	PREDIKSI	EVALUASI
1	2.2813548	1	TEPAT	26	0.289781	1	TEPAT
2	0.6716488	1	TEPAT	27	0.298785	1	TEPAT
3	-0.300745	1	TEPAT	28	0.922531	2	TIDAK TEPAT
4	0.2075405	1	TEPAT	29	3.051771	1	TEPAT
5	-1.7400887	1	TEPAT	30	-3.63301	1	TIDAK TEPAT
6	-0.6012367	1	TEPAT	31	1.206703	1	TEPAT
7	-0.6389451	2	TEPAT	32	2.662964	1	TEPAT
8	-2.1744386	1	TIDAK TEPAT	33	3.919655	1	TEPAT
9	0.8764362	1	TEPAT	34	-1.70227	1	TIDAK TEPAT
10	0.2588865	2	TIDAK TEPAT	35	-1.32026	2	TEPAT
11	1.2431741	1	TEPAT	36	0.262796	1	TEPAT
12	3.5183861	2	TIDAK TEPAT	37	0.516306	2	TIDAK TEPAT
13	1.0877188	1	TEPAT	38	0.027159	1	TEPAT
14	1.2179378	2	TIDAK TEPAT	39	-0.54722	1	TIDAK TEPAT
15	0.7423935	1	TEPAT	40	-0.08751	1	TIDAK TEPAT
16	0.8981685	1	TEPAT	41	0.337039	1	TEPAT
17	-0.5107474	2	TEPAT	42	0.258676	1	TEPAT
18	-2.398724	2	TEPAT	43	1.894534	2	TIDAK TEPAT
19	-2.6037419	2	TEPAT	44	-0.02113	1	TIDAK TEPAT
20	-2.1002097	2	TEPAT	45	0.256312	1	TEPAT
21	0.75448	1	TEPAT	46	-0.22783	1	TIDAK TEPAT
22	-0.7559668	2	TEPAT	47	0.704579	1	TEPAT
23	1.6034691	1	TEPAT	48	0.40822	2	TIDAK TEPAT
24	1.9076366	1	TEPAT	49	-0.57141	1	TIDAK TEPAT
25	1.5524696	2	TIDAK TEPAT	50	0.999544	1	TEPAT

Catatan: 1 = Status Non Financial Distress, 2 = Status Financial Distress

Sumber: data sekunder yang diolah

- Penelitian :
1. Nilai relevan market to books ratio sebagai pengganti beta saham dalam menentukan risiko investasi di BEJ. Skripsi. 2001.
 2. Nilai relevan informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Tesis. 2009.
 3. Penentu frekuensi rapat komite audit di Indonesia: Bukti pelaksanaan *governance* di Indonesia. 2011.
 4. *Monitoring mechanism* dan *firm value* di bursa efek Indonesia. 2011.

V. ORGANISASI DAN PENGALAMAN LAIN

- Organisasi** :
1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi:
 - a. Staf bidang II (1998-1999)
 - b. Kabid bidang II (1999-2000)
 2. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
 3. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
 4. Sekretaris Lembaga pengawasan dan pembinaan keuangan Pengurus Daerah Muhammadiyah Surakarta (2010-2015)
- Pengalaman dalam pengelolaan jurnal ilmiah** :
1. Staf Editor, **Jurnal Akuntansi & Bisnis**, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (2010- sekarang)

Surakarta, 29 Juni 2012



(Sutaryo)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

Nama (dengan gelar) : Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak.
 Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 10 Juni 1952
 NIP (Baru/Lama) : 195206101988031002 / 131 792 945
 No. Register Negara Akuntan : D-6197
 Jenis Kelamin : Pria
 Agama : Islam
 Pangkat / Gol.Ruang / TMT : Pembina Utama Muda / Gol.IVc / 1 Oktober 2009
 Pendidikan Tertinggi : Doktor (S3)
 Jabatan Fungsional/TMT : Guru Besar / 1 Desember 2006
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
 Unit Kerja : Universitas Sebelas Maret di Surakarta
 Alamat Rumah : Jl. Kali Kuantan No. 19, Jagalan RT 03 RW 10,
 Solo 57124

II. RIWAYAT PENDIDIKAN / KURSUS

Pendidikan Tinggi :

- Strata 1 : Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi (Drs.),
Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada
(tahun 1987)
- Strata 2 : Master of Commerce in Business Systems
(M.Com.), Curtin Business Schools, Curtin
University of Technology, Perth, Australia (tahun
1993)
- Strata 3 : Doktor (Dr.) Ekonomi-Akuntansi, Universitas
Gadjah Mada (tahun 2001)
(Judul Disertasi: Dampak Pemoderasi Perataan
Laba terhadap Kandungan Informasi Inkremental
Arus Kas)
- Lain-lain : *Indonesian Ph. D. Scholars Programs*, University
of Kentucky, Lexington, Kentucky, U.S.A., 1998
- Sertifikasi Profesi : Wakil Manajer Investasi (*Investement Manager
Representative*), 19 April 2005

III. RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN

1. UNS : a.. Dosen Fakultas Ekonomi:
 3) Program Studi Sarjana (S1)
 4) Program Studi Magister Manajemen (S2)
 5) Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan (S2)
 6) Program Studi Magister Akuntansi (S2)
 7) Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi (S3)
 b. Dosen Fakultas Hukum
 1) Program Studi Magister Hukum (S2)
 c. Direktur Program Studi Magister Manajemen (2001-2007)
 d. Dekan Fakultas Ekonomi (2007-2011)
2. UNDIP : c. Pernah menjadi anggota tim penguji dalam ujian disertasi / ko-promotor
 d. Dosen Program Doktor Ilmu Ekonomi
3. UGM : e. Pernah menjadi anggota tim penguji dalam ujian disertasi
4. BAN-PT : Asesor Akreditasi
5. IAI-KERPPA : Evaluator Pendidikan Profesi Akuntansi

IV. PENGALAMAN PENELITIAN / PUBLIKASI ARTIKEL / PENULISAN BUKU

- Buku Tidak Dipublikasi : 1. Auditing, Fakultas Ekonomi UNS, 1994
 2. Pasar Modal, Fakultas Ekonomi UNS, 1996.

- Essai
1. Group decision support systems, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Khusus, Desember 1996.
 2. Marketing of professional services, *Perspektif* No.4 Oktober-Desember 1996.
 3. Perbandingan antara saham berkapitalisasi besar dan kecil di Bursa Efek Jakarta (BEJ), *Perspektif* No. 5 Januari-Maret 1997.
 4. The use of application generator to test focal entity approach to prototyping, *Perspektif*, No. 7 Juli-September 1997.
 5. Analisis event studies dengan pendekatan multivariate regression model (MVRM) versus non-MVRM, *Perspektif*, No. 12, Oktober-Desember 1998.
 6. Topik-Topik Penelitian Akuntansi Keuangan, *Akuntabilitas*, Vol.1 No.2 September 2002.
 7. Dampak Pemilihan Event Windows dan Periode Pengamatan terhadap Hasil Pengujian Kandungan Informasi, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.4 No.2 November 2004, Hal.1 71-179

8. Perubahan Laba, Perubahan Dividen, dan Perubahan Laba yang Akan Datang, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.5 No.2 November 2005.

- Penelitian :
1. Keyakinan mahasiswa peserta matakuliah praktek pemeriksaan akuntan dalam mengenali bukti pemeriksaan, Penelitian Tidak Dipublikasi, FE UNS, 1994.
 2. Analisis tingkat penguasaan MKDK untuk memprediksi nilai MKK Pokok Jurusan Akuntansi FE UNS Surakarta, Penelitian Tidak Dipublikasi, FE UNS, 1996.
 3. Pengukuran kesadaran etika dan orientasi etika, *Empirika*, No. 20, 1997.
 4. Komponen akrual versus arus kas dari *earnings* dan persistensi *earnings*, Penelitian Tidak Dipublikasi, FE UNS, 1998.
 5. The relative persistence of earnings performance attributable to accrual versus cash flows component of earnings and earnings management, *Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, Ekonomi*, Vol.1 No.1 Februari 2001.
 6. Earnings-Price Ratio dan Kandungan Informasi Arus Kas, *Perspektif*, Vol.7 No.2 Desember 2002, Hal. 71-167.
 7. The Moderating Impact of Income Smoothing on the Incremental Information Content of Cash Flows, *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol.12 Desember 2003, Hal. 44-57.
 8. Persistensi Laba dan Pengumuman Perubahan Dividen Sebagai Suatu Sinyal, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol.5 No.2 Agustus 2005, Hal. 187-198.
 9. Determinan Struktur Modal Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian Tidak Dipublikasi. FE UNS, 2011

V. ORGANISASI DAN PENGALAMAN LAIN

- Organisasi** :
1. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI):
 - a. Pengurus IAK-KAPd (Dua periode s/d 2006)
 - b. Anggota Komite Etika IAI (2002-2006)
 2. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
 3. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
- Pengalaman dalam pengelolaan jurnal ilmiah** :
1. Ketua Dewan Editor, **Jurnal Akuntansi & Bisnis**, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

- Universitas Sebelas Maret
2. Ketua Dewan Editor, **Jurnal Bisnis dan Manajemen**, Program Studi Magister Manajemen Universitas Sebelas Maret
 3. Anggota Dewan Editor (Penyunting Ahli), **Perspektif**, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
 4. Anggota Dewan Editor, **JEBA Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi**, Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman
 5. Anggota Dewan Editor, **Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Sistem Informasi “MAKSI”**, Program Studi Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.
 6. Anggota Dewan Editor, **Jurnal Akuntansi dan Auditing**, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.

VI. LAIN-LAIN

Tanda Kerhormatan : Satyalencana Karya Satya 10 tahun (2 April 2005)

Surakarta, 29 Juni 2012



(Bambang Sutopo)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Prof. DR. Hj. Rahmawati, MSi, Ak
2. NIP : 19680401 199303 02 001
3. Status dosen : Dosen tetap negeri
4. Tempat/tgl lahir : Surakarta/1-4-1968
5. Jenis kelamin : Wanita
6. Pangkat/golongan : Pembina tingkat 1/IV b
7. Jabatan fungsional : Guru besar
8. Riwayat pendidikan : SD NDM Surakarta tahun 1980
 SMPN III Surakarta tahun 1983
 SMAN II Surakarta tahun 1986
 S1 Akuntansi FE UNS 9 Desember tahun 1991
 S2 Bidang ilmu akuntansi UGM 19 Nopember tahun 1997
 S3 Bidang ilmu akuntansi UGM 25 April 2007
 Pelatihan pemeriksa di BPKP 1992
 Pelatihan auditor internal di IPB 2009
 Pelatihan asesor BAN PT 2008
 Pelatihan aseor BAN PT format baru 2009
 Pelatihan auditor internal di SPI UNS 2008, 2009
 Pelatihan pembuatan proposal penelitian berkualitas di FE UNS
 Pelatihan pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat
 FE UNS
 Pelatihan *academic writing* di FE UNS
 Pelatihan auditor Nopember tahun 2010 oleh YPIA Indonesia
9. Jabatan structural : - Sekertaris Program D3 Akuntansi periode Jan 1997-
 Desember 1998
 - Ketua Program D3 perpajakan periode Januari 1999 Desember
 2002
 - Bendahara Due Like Januari 1999-Desember 2003
 - Team satuan pengawas intern UNS 1994
 - Ketua bidang keuangan SPI UNS 2008 sampai sekarang
 - Koordinator penelitian dan pengabdian pada masyarakat
 Fakultas Ekonomi (KPPMF) 2007-2008, ketua P4M FE
 tahun 2007 sampai sekarang
10. Alamat Rumah : Jl. Delima 1 no.8D Jajar Surakarta 57117
 Telp. 0271 (723735) HP. 081 226 58200
 Email: rahmaw2005@yahoo.com
11. Riwayat pekerjaan: - Internal auditor distributor batik Danar Hadi Surakarta 1991
 - BPKP 1992
 - Dosen tidak tetap STIES tahun 1993
 - Dosen tidak tetap STIE Atma Bakti Surakarta tahun 1994
 - Dosen FE UNS 1992 sampai sekarang
 - Dosen MAKSI FE UNS
 - Dosen PPAK UNS
 - Dosen S3 ilmu ekonomi FE UNS 2009 sanpai sekarang
 - Dosen FKIP S2 pendidikan Ekonomi UNS 2010 sampai sekarang
 - Asesor BAN PT mulai Februari tahun 2008 sampai sekarang
 - Pengurus ISEI cabang Surakarta 2008 sampai sekarang
 - Asesor internal akreditasi UNS 2009 sampai dengan sekarang
 - Joint audit sertifikasi Guru melalui jalur pendidikan 17 s/d 31
 Oktober 2009

12. Alamat kantor : Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta Telp. (0271) 647481

Surakarta, 29 juni 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rahmawati', with a small horizontal line at the end.

(Rahmawati)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : Sutaryo, SE, M.Si., Ak
NIP : 197710012010121002
Tempat/tgl lahir : Sragen, 01 Oktober 1977
Pekerjaan : Dosen
Universitas : Universitas Sebelas Maret/ Fakultas Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa artikel dengan judul **RELEVANSI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN CASH MODIFIED BASIS: Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status *Financial distress* Pemerintah Daerah di Indonesia** merupakan hasil penelitian saya beserta tim yang belum pernah dipublikasikan dalam j urnal atau media publikasi apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ada ketidaksamaan dengan apa yang saya nyatakan ini, saya bersedia dan sanggup menerima konsekuensi apapun.

Surakarta, 29 Juni 2012
Yang menyatakan,

Sutaryo, SE, M.Si., Ak
NIP. 197710012010121002